

BAB III

KRONOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TRAGEDI 98 DI JAKARTA

3.1. Peluang Kekerasan Terhadap Perempuan Masa Orde Baru

Orde baru merupakan sebutan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto.⁴⁴ Meskipun mengklaim pemerintah Soeharto sebagai antitesa dari rezim pemerintah Soekarno, faktanya pada proses pelaksanaan pemerintahan orde baru masih sama membawa corak kekuasaan otoriter.⁴⁵ Segala aspek kehidupan, dari sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama semuanya diatur dan dikontrol oleh pemerintah dengan sistem dwifungsi militer untuk menjaga dan melindungi keutuhan negara.⁴⁶ Kebijakan dan keputusan orde baru dikeluarkan secara sentralistik. Negara berperan sebagai institusi yang memiliki legitimasi dalam melakukan berbagai upaya untuk pengamanan negara meskipun proses pengamanan tersebut dilakukan melalui kekerasan dan tindakan represif lainnya.

Gaya militeristik pemerintah orde baru dengan gaya hubungan korporatif membuat masyarakat Indonesia bertindak militeristik pula. Sistem militeristik yang diterapkan memberi dampak negatif terhadap kehidupan perempuan, hal

⁴⁴ Menurut KBBI, orde baru merupakan tata pemerintah Indonesia yang baru, berlangsung sejak 11 Maret 1966 sampai 20 Mei 1998. Nugroho Notosusanto menyebutkan bahwa orde baru menjadi masa ketika kehidupan nasional kembali pada pemurnian pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Purwanto Putra, "Strategi Dan Bentuk-Bentuk Informasi Transmigrasi Pada Masa Orde Baru Dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional," *Jurnal Kepustakawan dan Masyarakat Membaca*, Vol. 35, No. 2 (2019): 1–15, hlm. 1-2.

⁴⁵ Jopie Lasut, jurnalis senior Indonesia menjelaskan bahwa sebutan orde baru pertama kali diciptakan oleh kelompok A.H. Nasution untuk membedakannya dengan pemerintahan Soekarno yang mendapatkan dukungan dari generasi muda dan pihak militer. Sebutan orde baru semakin populer ketika sudah dibawa dalam sidang MPRS dan dipatenkan oleh KAMI pada tahun 1966. Hendi Johari, "Dibalik Istilah Orde Baru," *Historia.Id*, last modified 2020, <https://historia.id/amp/politik/articles/di-balik-istilah-orde-baru-vZVXp>.

⁴⁶ Siti Fatimah, "Perempuan Dan Kekerasan Pada Masa Orde Baru," *Demokrasi* VI, no. 2 (2007): 99–111, hlm. 100.

tersebut diperparah dengan budaya patriarki⁴⁷ yang terus dilanggengkan oleh masyarakat Indonesia. Dampaknya, praktik kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan di masa orde baru semakin lebar peluangnya. Sikap pemerintah orde baru yang melakukan penetrasi militer dalam segala aspek ternyata berdampak juga terhadap munculnya sifat kesewenang-wenangan dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara tersistematis dari kalangan elit sampai bawah. Tindakan kekerasan yang begitu sering terjadi di masa orde baru tidak lepas dari hubungan antara negara dengan kekerasan.

Negara menjalankan praktik kekerasan bukan sebagai hukuman atas pelanggaran instrumen hukum, melainkan kekerasan ditegakkan untuk menunjukkan kokohnya kekuasaan politik yang dimiliki. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara ditopang berdasarkan kemampuannya mengolah kekerasan. Hal tersebut dijelaskan pula oleh pemikiran Foucault:

“Faktanya, pelestarian praktek penyiksaan (*practice of torture*) bukan terletak pada hukuman (hukuman harus lebih berat dari perbuatan kriminalnya) tetapi lebih pada kebijakan terror; membuat semua orang mengerti, melalui badan kriminalitas, terdapat kehadiran kekuasaan” (Michael Foucault).⁴⁸

Kekerasan digunakan oleh negara sebagai salahsatu instrumen kekuasaan politik yang dimiliki. Pemikiran tersebut membuat negara melegitimasi kekerasan sebagai salahsatu cara pengamanan negara yang sering kali didasarkan pada ideologi yang dianut. Menurut Thomson, mempelajari ideologi artinya

⁴⁷ Patriarki merupakan budaya yang menempatkan kuasa laki-laki lebih unggul daripada perempuan, sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan maupun ketidakadilan gender. Berlakunya patriarki ini menyebabkan adanya pembatasan atau perbedaan antara hak perempuan dan lelaki, sehingga perempuan tidak bisa menikmati haknya di segala aspek kehidupan. Ade Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Social Work Jurnal*, Vol. 7, no. 1 (2017): 1–29, hlm. 72.

⁴⁸ Gadis Arivia, “Logika Kekerasan Negara Terhadap Perempuan,” dalam *Negara Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000, 3–19, hlm. 40.

mempelajari nilai dan tanda pelayanan untuk melestarikan dominasi. Ideologi yang digunakan oleh orde baru sehingga tercipta peluang perempuan menjadi sasaran kekerasan adalah ideologi ibuisme.⁴⁹ Melalui ideologi gender ini, perempuan ditempatkan menjadi sosok yang penting dalam rumah tangga dan tetap berkontribusi pada pembangunan negara.

Nilai-nilai dari konsep perempuan yang diwacanakan oleh orde baru dalam bingkai masyarakat yang sudah patriarki mendukung adanya pelayanan pada relasi yang sudah mendominasi (kekuasaan laki-laki). Nilai-nilai yang telah dilegitimasi dalam bentuk wewenang akan membuat relasi antara wewenang dengan kekerasan menjadi identik.⁵⁰ Sebelum kekerasan berwujud fisik, terlebih dahulu kekerasan tersebut dilegalkan dengan muatan pengetahuan berupa norma dan aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam kebijakan umum negara (GBHN⁵¹, UU Perkawinan, Repelita) dan program yang dibuat oleh pemerintah seperti PKK⁵² dan Dharma Wanita.⁵³ Program yang dibuat oleh pemerintah tersebut hanyalah setumpuk program yang hanya mengukuhkan perempuan dalam

⁴⁹ Konsep ibuisme dirancang untuk membatasi gerak perempuan guna menjaga tatanan hirarki sosial yang secara langsung melahirkan berbagai *stereotype* dan ketidakadilan bagi perempuan. Perempuan dipaksa menerima kondisi sempit sebagai istri dan ibu karena memang seperti itu “kodrat” perempuan. Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, Jakarta: komunitas bambu, 2011, hlm. 10.

⁵⁰ Toety Heraty Noerhadi, “Kekerasan Negara Terhadap Perempuan,” in *Negara Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000, 23–32 hlm. 28.

⁵¹ Isi GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang telah disusun oleh pemerintah dan dijabarkan sebagai tugas utama perempuan oleh Departemen Dalam Negeri. Kebijakan tersebut menempatkan perempuan yang wajib mendukung dan membantu pembangunan negara tanpa meninggalkan posisinya sebagai ibu rumah tangga, urusan dan pekerjaan rumah tangga, pendidik anak, dan pencari nafkah tambahan. Fatimah, *loc.cit.*

⁵² PKK melambangkan domestifikasi perempuan ketika program PKK hanya berputar terhadap sandang, tata kelola rumah tangga, pendidikan istri, pendidikan anak, yang diterapkan dengan asas “kekeluargaan” dan mengandung norma keluarga batih sebagai pendukung ekonomi negara. Suryakusuma, *loc.cit.*

⁵³ Poin-poin panca Dharma Wanita mendefinisikan perempuan hanya sebagai istri, ibu rumah tangga, penerus keturunan, pendidik anak, pencari nafkah tambahan, warga negara dan anggota masyarakat. *Ibid.*

porsi “kodratnya” dengan pemusatan permasalahan dan urusan perempuan ke dalam koordinasi Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW).

Organisasi perempuan yang menjadi mitra kerja UPW kehilangan otonomi karena pergerakan organisasi dikontrol ketat oleh pemerintah. Perlawanan terhadap pemerintah dapat dengan mudah dibungkam dan dicap sebagai kaum subversif. Hubungan patron-klien yang tercipta antara pemerintah dan organisasi perempuan dilanggengkan dan telah melenyapkan kemerdekaan perempuan yang seringkali dicerai oleh tindakan patriarkal pemerintah Soeharto.⁵⁴ Hirarki yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki juga termanifestasikan dalam pelaksanaan organisasi perempuan di masa orde baru. Kondisi tersebut terlihat dari sistem Dharma Wanita sebagai organisasi perkumpulan para istri pegawai negeri. Korpri berperan sebagai pembina sekaligus penentu hirarki dalam Dharma Wanita. Hal tersebut terlihat dalam mekanisme pemilihan struktur organisasi Dharma Wanita yang mengikuti jabatan suami dalam bidang pemerintahan.

Kondisi tersebut menampilkan tidak adanya kebebasan dalam menentukan pilihan sendiri sekalipun dalam mimbar organisasi. Hubungan antara perempuan dan laki-laki memperlihatkan konsep “bapak-ibuisme”. Perempuan bergerak *dependent* dibalik bayang-bayang suami. Perempuan juga mengalami domestifikasi yang terlihat dari poin-poin panca Dharma Wanita yang mendefinisikan perempuan hanya sebagai istri, ibu rumah tangga, penerus keturunan dan pendidik anak, pencari nafkah tambahan, sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Tidak heran jika selama orde baru, gerakan perempuan

⁵⁴ Soeharto menjadikan perempuan aktivis kiri sebagai tahanan politik dan melemahkan organisasi perempuan. Anna Maria, *Perbudakan Seksual Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang Dan Neofasisme Orde Baru* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2001).

Indonesia mengalami kemerosotan signifikan karena dibungkam dan tidak memiliki suara politik.⁵⁵

Berdasarkan program yang dirancang, perempuan menjadi pion penting dalam urusan rumah tangga dan harus tunduk pada suami/ayah, sedangkan di ruang publik dianggap sebagai SDM tambahan. Kondisi tersebut membuat posisi perempuan rentan diperlakukan tidak adil dan mendapatkan kekerasan di lingkungan privat dan atau publik. Propaganda manis selalu menyatakan emansipasi telah tercapai, namun nyatanya kondisi tersebut tidak pernah tercipta. Impian tersebut sulit terjadi jika mengandalkan perubahan dari sistem sosial dan hukum negara kita yang masih bertumpu pada kuasa laki-laki (*the law of the father*). Menurut Langenberg, setiap dasar dari segala stratifikasi sosial di Indonesia adalah bapak. Bapak berperan sebagai patron dan setiap klien memiliki bapak sehingga tercipta hubungan “bapakisme” atau “bapak-anak buah”.⁵⁶

Bukti nyata kekerasan terhadap perempuan di masa orde baru yaitu ketika terjadi kericuhan Tanjung Priok, peristiwa Marsinah, penculikan para aktivis, sampai penembakan misterius. Beragam peristiwa tersebut telah memakan korban jiwa dari kalangan perempuan. Bahkan terjadi penyiksaan dan pemerkosaan yang dilakukan elit tentara di Aceh dan Irian Barat ketika sedang menjalankan tugas pengamanan negara.

⁵⁵ Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa Sebuah Kajian Pasokolonial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 12-13.

⁵⁶ Fitri Lestari, “Menilik Kembali Peran Organisasi Perempuan Di Masa Orde Baru,” *Jurnal Perempuan*, last modified 2016, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/menilik-kembali-peran-organisasi-perempuan-di-masa-orde-baru?locale=en>.

Tabel 3. 1
Pelaku dan bentuk kekerasan terhadap perempuan

Keluarga	Masyarakat	Negara
Penyerangan fisik <ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan - Penganiayaan - Penyunatan - Pengendalian alat reproduksi - Pembunuhan terhadap bayi perempuan 	Adat dan tradisi <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan fisik - Penganiayaan - Hukuman fisik - Pengendalian / pemaksaan terhadap alat reproduksi - Suti - Pemerkosaan 	Kekerasan politik (kebijakan, UU, dsb) <ul style="list-style-type: none"> - Penahanan tidak sah - Sterilisasi (pemandulan paksa) - Kehamilan paksa - Kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh negara
Penganiayaan seksual <ul style="list-style-type: none"> - Perkosaan - Inses 	Di tempat kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pelecehan seksual - Intimidasi seksual - Kekerasan yang diperdagangkan - Perdagangan perempuan - Pelacuran paksa 	Kekerasan dalam tahanan (militer/polisi) <ul style="list-style-type: none"> - Pemerkosaan - penyiksaan
Penganiayaan mental <ul style="list-style-type: none"> - Pengurungan - Kawin paksa 	Media massa <ul style="list-style-type: none"> - Pornografi - Eksploitasi tubuh - Komersialisasi perempuan 	

Sumber : Olah data bahan kampanye UNIFEM 1990an

Kejadian tersebut menandakan bahwa orde baru tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk memastikan setiap rakyat merasa aman, khususnya keamanan perempuan. Puncak kekerasan terhadap perempuan di masa orde baru terjadi ketika kerusuhan Mei 1998.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Tragedi 98 di Jakarta

Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di tengah kerusuhan 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari beragam dinamika situasi nasional yang kacau pada saat itu. Adanya pelembagaan politik diskriminasi masa pemerintahan menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar, peristiwa krisis ekonomi,

sidang umum MPR-RI 1998, banyaknya demonstrasi sampai tewasnya mahasiswa Universitas Trisakti menjadi serangkaian faktor pemicu lahirnya kerusuhan Mei 1998 yang diiringi dampak lanjutan berupa tindakan kekerasan seksual.⁵⁷

3.2.1. Politik Diskriminasi

Pemerintah orde baru memberikan perlakuan berbeda bagi warga negara non Tionghoa dengan warga keturunan Tionghoa. Warga non Tionghoa diberi pembatasan dalam bidang ekonomi sedangkan warga Tionghoa diberi kemudahan dalam bidang ekonomi. Sebaliknya, dalam kehidupan sosial-politik warga non Tionghoa diberi kemudahan akses seperti biasanya sedangkan warga Tionghoa mengalami pembatasan hingga pelarangan yang ketat. Warga Tionghoa mengalami rasialisme secara “sempurna”. Hal tersebut sampai disebutkan oleh Ariel Heryanto (1998) sebagai momen bersejarah terciptanya kelas elit Tionghoa yang bisa sekaya dan secara bersamaan setertindas itu di masa orde baru.⁵⁸ Penciptaan identitas dan peran warga Tionghoa dirangkai sedemikian rupa oleh pemerintah melahirkan adanya diskriminasi, rasa benci dan asumsi yang dipisahkan oleh ketimpangan ekonomi dan sosial.

3.2.1.1. Rekonstruksi Identitas

Identitas ke-Indonesiaan dan ke-Tionghoan yang mengalir dalam tubuh warga Tionghoa menjadi tanda multikultural di Indonesia. Identitas suatu masyarakat atau individu tidak bisa diukur dan ditentukan dari satu aspek geografis karena ada identitas kultur yang ikut berperan.⁵⁹ Warga Tionghoa

⁵⁷ Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *op.cit*, hlm.5.

⁵⁸ Ariel Heryanto, “Kapok Jadi Nonpri,” *Kompas*: Jakarta, 1998, hlm. 4.

⁵⁹ Meij, *Op.cit*. hlm. 19.

memiliki dua sisi identitas sekaligus, mereka diakui sebagai Tionghoa dalam aspek kultur dan dalam aspek geografis merupakan warga Indonesia karena sudah menetap lama di Indonesia. Bahkan sebutan Tionghoa hanya diberikan kepada keturunan Cina yang tinggal di Indonesia.⁶⁰ Secara historis, artinya kehadiran mereka sudah seharusnya diperlakukan sama dengan masyarakat lain, tanpa ada perlakuan khusus atau perbedaan. Namun nyatanya, dualisme identitas tersebut mendatangkan beberapa gesekan dengan warga non Tionghoa yang memicu sikap rasis dan diskriminasi.

Ester Indahyani Jusuf, selaku Dewan Pekerja dari Komite Pemuda Indonesia untuk penghapusan diskriminasi ras menyebutkan, bahwa kerusuhan massa dengan sentimen anti Tionghoa tidak lepas dari kebijakan orde baru yang memang cenderung diskriminatif.⁶¹ Negara terus melakukan produksi simbol diskriminatif yang sistematis terhadap etnis tersebut, salahsatunya mengenai identitas. Pembentukan identitas warga Tionghoa di masa orde baru dirancang melalui kebijakan pemerintah yang sering memuat rasialisme.⁶² Kebijakan rasis langsung dikeluarkan oleh orde baru pasca meletusnya tragedi 30 September 1965.

Tragedi kelam yang diduga dilakukan oleh PKI tersebut berhasil membuat masyarakat Tionghoa kena imbasnya. Pemerintah cenderung menggiring opini

⁶⁰ Istilah Tionghoa mulai mapan pada tahun 1930an dan digunakan sebagai pengganti kata "Cina". Tionghoa menjadi penunjukan masyarakat Cina yang hanya ada di Indonesia, di Singapura menggunakan istilah Huaren / Suku Hua. Hal tersebut menjadi pas untuk pengganti sebutan WNI keturunan Cina. Amir Sidharta, "Cina, Tionghoa, Shunghua, Suku Hua," D&R Mereka Tewas? Sampai Di Mana Batas Penyiksaan Ala Militer No. 50/XXX/1 Agustus 1998 (Jakarta, 1998).

⁶¹ Kompas, "Pemerintah Harus Bertanggung Jawab," *Kompas* (Jakarta, 1998), hlm. 13.

⁶² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasialisme merupakan perlakuan berbeda yang diberikan pada seseorang atau kelompok karena didasarkan pada prasangka paham ras atau kesukuan.

publik bahwa warga Tionghoa dekat dengan kegiatan komunis yang hanya berdasar pada dugaan asal tanah air leluhurnya, yaitu dari Cina yang memegang ideologi komunis. Hal tersebut terlihat dengan jelas ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembuatan surat keterangan tidak terlibat dalam G30S/PKI dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Ketakutan dan kecurigaan pemerintah terhadap segala unsur yang diyakini dalang komunis juga mempengaruhi penerapan nama, bahasa dan budaya Tionghoa. Penggunaan nama dan kata yang mengandung bahasa mandarin harus dirubah. Hal tersebut membuat masyarakat Tionghoa rugi karena dipersulit dalam hal administrasi dan birokrasi. Belum lagi banyaknya berkas yang diajukan selalu disertai dengan biaya dan pungutan liar.

Kebijakan-kebijakan administratif dengan pelabelan khusus pada kartu tanda penduduk membuat warga Tionghoa menjadi krisis identitas. Mereka dilarang untuk mempelajari, melestarikan budaya tanah leluhur dan meninggalkan segala simbol ke-Tionghoan. Warga Tionghoa dilihat sebagai entitas masyarakat yang berbeda, status mereka seolah tidak sepenuhnya dianggap menjadi warga negara di Indonesia. Relasi yang jauh dengan konstruksi identitas yang dibedakan semakin berkembang menciptakan pandangan negatif antar masyarakat.

Pandangan negatif semakin berkembang ketika pemerintah memberikan kemudahan investasi dan fasilitas pada kelompok Tionghoa. Kebijakan tersebut melahirkan dua kelompok. kelompok elit Tionghoa yang berkembang menjadi pemegang sektor ekonomi dan kelompok non Tionghoa yang menjadi “budak” di negara sendiri. Dampak ketimpangan ekonomi tersebut melahirkan stereotip

identitas pada warga Tionghoa karena dianggap dekat dengan pemerintah yang melakukan praktik KKN. Mereka dicap sebagai orang eksklusif, elit konglomerat dan gila harta.⁶³ Identitas Tionghoa sebagai kelompok elit tidak terlepas dari lebarnya jarak ketimpangan ekonomi yang tercipta.

3.2.1.2. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru terjadi karena pemerintah memberikan kemudahan fasilitas dan kesempatan pada segelintir konglomerat yang secara garis besar berasal dari keluarga pejabat atau pengusaha Tionghoa. Sikap pemerintah cenderung memilih Tionghoa dalam praktik ekonomi karena demi keamanan hegemoni politik, sebab apabila pengusaha pribumi yang diberikan kemudahan ditakutkan akan bisa membangun basis massa.⁶⁴ Sejak awal 1980 pemerintah mengeluarkan kredit puluhan triliun rupiah kepada konglomerat tersebut.⁶⁵ Hasilnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 dengan persentase modal kelompok bisnis banyak dimiliki oleh pengusaha non pribumi.

⁶³ Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa Sebuah Kajian Pasckolonial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) hlm. 27.

⁶⁴ Pemerintah memilih pengusaha Tionghoa sebagai rekan kerja karena berdasar pada kemampuan mengelola modal yang dianggap lebih baik dan memiliki pengalaman yang lebih. Evi Kristanti Sunarko, "Faktor Penyebab Kerusakan Anti Etnis Cina Bulan Mei 1998" (Universitas Jember, 2003).

⁶⁵ Ketika pemerintah menempuh jalan ekonomi pasar, warga keturunan Tionghoa lebih siap menghadapi kesempatan tersebut apalagi ketika terjalannya interaksi dengan pasar global yang baik. Kompas, "Partai Pembauran, Partai Tionghoa Dan Tantangan 'National Building,'" *Kompas*: Jakarta, 1998.

Tabel 3. 2
Kelompok bisnis menurut aset dalam juta rupiah

Interval Modal	Non Pribumi	Pribumi	Total
0-49	102 (34,00%)	53 (17,6%)	155 (51,67%)
50 - 100	36 (12,00%)	12 (4,00%)	48 (16,00%)
101 – 150	22 (7,33%)	2 (0,6%)	24 (8,00%)
151 – 200	7 (2,33%)	6 (2,00%)	13 (4,33%)
-201 ke atas	12 (4,00%)	1 (0,33%)	13 (4,33%)
Total	226 (76,00%)	72 (24,00%)	300 (100%)

Sumber : Kompas, 13 Agustus 1995, dalam Evi Kristanti Sunarko, Universitas Jember, 2003, hlm. 58

Berdasarkan tabel 3.2 perbandingan jumlah kelompok bisnis menurut aset bisa terlihat persentase modal antara kelompok pribumi dan non pribumi. Kelompok modal yang paling kecil di kisaran 0-49 juta rupiah saja kelompok pengusaha pribumi sudah kalah jauh dengan non pribumi. Pribumi hanya mampu menguasai 17,6% atau sebanyak 53 kelompok. Terlebih di kelompok modal paling besar 201 juta rupiah ke atas, pengusaha pribumi hanya menyumbang satu di persentase 0,33%. Total 300 konglomerat yang terdata tersebut terbagi menjadi 14 kroni kapitalisme dan 22 birokrat kapitalisme dengan aset 14 triliyun rupiah. Salah satu konglomerat yang berkuasa adalah Salim Group⁶⁶ yang memegang dana 55% dari GDP atau setara dengan asset 4 triliyun rupiah. Asset besar yang berhasil didapatkan oleh para elit konglomerat merupakan buah manis dari rencana pemerintah dalam investasi yang dilakukan di berbagai proyek.

Pemerintah menetapkan status modal asing dalam negeri setara dengan modal nasional WNI. Kebijakan tersebut membuat modal swasta Tionghoa

⁶⁶ Perusahaan Salim Group berhasil menjadi konglomerat karena berhasil memanfaatkan jaringan yang dikelolanya. Sudono Salim selaku pemilik perusahaan dekat dengan Presiden dan petinggi militer Indonesia sehingga bisa melebarkan sayap bisnis sampai di luar kawasan Indonesia. Rohani Budi Prihatin, "Review Buku Liem Liong Dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto," *Aspirasi* 1, no. 2 (2016): 209–214, hlm. 211-212.

mendapatkan perlakuan berbeda, seperti pemberian kebebasan pajak sampai mengadakan *joint venture* dengan perusahaan pemerintah membuat pihak swasta tidak diberikan batas waktu operasi.⁶⁷ Terjadinya kolusi dari pemerintah dengan swasta Tionghoa membuat masyarakat Tionghoa menikmati kemewahan investasi proyek kecil sampai besar.⁶⁸ Data investasi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Data investasi tahun 1967-1980

Ivestasi Negara	58,75%
Investasi Swasta Non Pribumi	29,95%
Investasi Swasta Pribumi	11,20%
Lain-Lain	3,10%

Sumber : Arief Budiman, “Sejarah Gagalnya Pembangunan Orba”, dalam Evi Kristanti Sunarko. Universitas Jember, 2003, hlm. 57

Investasi swasta berdasarkan tabel 3.3 di dominasi oleh investasi negara di 58,75% dan investasi swasta non pribumi di angkat 29,95%. Berdasarkan investasi tersebut di tahun 1994 sebanyak 300 kelompok bisnis yang berjumlah 4.165 perusahaan berhasil masuk dalam kategori konglomerat dengan nilai aset dikisaran US\$ 50 juta-US\$ 700 juta dengan total gabungan senilai US\$ 18.580,4 juta.⁶⁹ Dominasi pengusaha Tionghoa dalam ekonomi nasional pada masa orde baru adalah sebesar 74% dari total 12.657 perusahaan dengan total aset sebanyak US\$ 25.887.000. Kondisi tersebut ternyata berhasil menciptakan kehidupan pengusaha swasta non pribumi seperti Tionghoa lebih sejahtera dibanding

⁶⁷ UU Penanaman Modal Dalam Negeri dikeluarkan pada 3 Juli 1968. Sunarko, *Op. cit*, hlm 46.

⁶⁸ Bambang Bujono et al., “Cina Atau Tionghoa, Bukan Itu Soalnya,” *D&R Bayang-Bayang Ketakutan Itu No. 46/XXIX* (Jakarta, 1998), hlm 49.

⁶⁹ Sunarko, “Faktor Penyebab Kerusuhan Anti Etnis Cina Bulan Mei 1998.”

pengusaha lainnya. Kekayaan warga Tionghoa yang beriringan dengan praktik KKN memunculkan sentimen penolakan investor asing atau cukongisme.⁷⁰

Kecakapan masyarakat Tionghoa dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan kebiasaan leluhur mereka yang sudah sangat dekat dengan kegiatan berdagang dan menjalin relasi kerja.⁷¹ Kondisi tersebut juga dirancang untuk mempertahankan hubungan pengusaha keturunan Tionghoa dengan para birokrat maupun penguasa militer, lalu ketika keadaan politik tidak berjalan lancar maka Tionghoa bisa dijadikan kambing hitam.⁷² kondisi tersebut terlihat ketika Indonesia dihadapkan dengan krisis ekonomi yang menambah parah kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan ekonomi terjadi ketika pemerintah mempercayakan aliansi usaha keluarga pejabat dengan pengusaha Tionghoa dengan harapan bisa mendatangkan *trickle down effect*⁷³, tapi kenyataan berkata sebaliknya. Keleluasan yang diberikan mengaburkan batas antara pengusaha dan penguasa.⁷⁴ Iklim ekonomi yang tidak sehat menimbulkan inefisien ekonomi dan pengkonsentrasian kepemilikan asset ekonomi. Pejabat pemerintah yang memberikan kesempatan lebih besar pada pengusaha Tionghoa berhasil

⁷⁰ Akhir tahun 1990, dikeluarkan kebijakan deregulasi bidang finansial, Paket Oktober 1988 yang membuka kesempatan pada pengusaha Tionghoa untuk menjalin kerjasama dengan institusi finansial asing. Kompas, "Partai Pembauran, Partai Tionghoa Dan Tantangan 'National Building'", *Kompas* (Jakarta, 1998), hlm. 4.

⁷¹ Menurut penelitian pakar ekonomi Gordon Redding, meskipun populasi orang Tionghoa di Indonesia hanya 2.1% namun mereka menguasai hampir ¾ modal swasta dalam negeri. Onghokham, *op.cit.*, hlm. 28-29.

⁷² D&R, "Agar Tak Jadi Kambing Hitam," *D&R Saat Kita Berterus Terang No.45/XXIX/13 Juni 1998* (Jakarta, 1998). hlm. 27.

⁷³ *Trickle Down effect* menyebutkan bahwa kemajuan ekonomi yang dimiliki oleh beberapa pihak akan mengalir ke bawah menciptakan peluang ekonomi yang merata. Dwi Larasati, *Analisis Trickle down Effect Sektor Pariwisata Kota Batu Tahun 2007-2015*, Universitas Brawijaya (Malang, 2017).

⁷⁴ CN H Latief, "SARA dan Reformasi," *Kompas* (Jakarta, 1998), hlm. 1.

dimanfaatkan oleh kaum elit untuk memainkan peran modal dengan baik sehingga mendapatkan kekuasaan dan perlindungan.

3.2.1.3. Ketimpangan Sosial

Munculnya kaum elit Tionghoa secara ekonomi tidak membuat mereka menjadi golongan yang penting di ranah sosial-politik. Faktanya masyarakat Tionghoa selalu menjadi kambing hitam dalam permasalahan politik karena identitas mereka yang apolitis.⁷⁵ Kondisi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa dengan pembatasan kegiatan membuat sebagian besar masyarakat Tionghoa hidup dalam komunitasnya sendiri di pemukiman khusus yang disebut Pecinan⁷⁶, meskipun tidak semuanya masyarakat Tionghoa menutup diri.

Tabel 3. 4
Persentase penduduk dan pengeluaran nasional

Tahun	Kelompok Bawah (40%)	Kelompok Menengah (40%)	Kelompok Atas (20%)
1984	20,75	37,28	41,97
1987	20,87	37,48	41,65
1990	21,30	36,70	41,90
1993	20,30	36,90	42,80
1996	20,20	35,10	44,90

Sumber : Indikator kesejahteraan rakyat, BPS 1998
dalam Evi Kristanti Sunarko. Universitas Jember, 2003, hlm. 52

Berdasarkan data tabel diatas terlihat jelas perbedaan daya beli masyarakat. Pengeluaran nasional atau daya beli paling banyak dilakukan oleh kaum atas. Setiap tahunnya daya beli barang dan atau jasa yang dilakukan elit atas terus naik

⁷⁵ Masyarakat Tionghoa dijadikan korban terlihat dalam peristiwa pembakaran toko-toko Tionghoa di Jawa Barat tahun 1963, kerusuhan 1966, pembantaian 1965-1966 hingga terjadi lagi di tahun 1998. Onghokham, *loc.cit.*

⁷⁶ Pecinan merupakan kawasan pemukiman atau kelompok rumah yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa. Menurut Onghokham (2017), Pecinan awalnya dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan melakukan pemisahan dan pengontrolan pada orang Tionghoa pasca pemberontakan tahun 1740. Dila Aprilia, "Sejarah Kampung Pecinan Di Jambi Abad 19-20" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

di angka 40%. Berbeda dengan kaum bawah yang hanya mampu melakukan pengeluaran atau daya beli di angka 20% dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Tidak aneh jika dengan pendapatan dan daya pengeluaran yang besar membuat masyarakat Tionghoa memilih menjadi pengusaha atau wirausahawan.

Maraknya kompleks usaha atau kompleks perumahan yang dibangun oleh para konglomerat semakin memperlebar kesenjangan dan eksklusifitas warga Tionghoa. Terpisahnya masyarakat Tionghoa dari kehidupan sosial mengakibatkan etnis Tionghoa mendapatkan tindakan eksklusi sosial.⁷⁷ Kondisi tersebut menciptakan jarak antara masyarakat Tionghoa dengan non-Tionghoa.⁷⁸ Semakin jauh jarak dan semakin jarang interaksi maka semakin lebar peluang terciptanya *miss* komunikasi. Hal tersebut tergambar dari berbagai pandangan dari masyarakat umum terhadap Tionghoa.

Peran Tionghoa yang sangat besar dalam ekonomi negara ternyata melahirkan sentimen. Masyarakat Tionghoa yang sukses dalam bidang ekonomi selalu menjadi target kerusuhan di setiap terjadinya krisis atau inflasi harga barang yang melambung tinggi. Dekatnya Tionghoa dengan kegiatan ekonomi membawa sentimen anti Tionghoa yang dilakukan oleh masyarakat dengan demonstrasi penolakan kebijakan yang mempermudah investasi asing atau disebut dengan cukong (ditujukan kepada warga negara Tionghoa).

⁷⁷ Eksklusi sosial menurut KBBI merupakan tindakan mengeluarkan sesuatu atau seseorang dan/ keadaan dikeluarkan dari arus utama. Menurut Pasurdi Suparlan (2003) eksklusi sosial berasal dari persaingan kesukubangsaan yang didefinisikan sebagai jati diri dari indikator asal lahir atau asal daerah. Eksklusi sosial menimbulkan prasangka terhadap kelompok lain dianggap asing. Pasurdi Suparlan, "Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia" Hikmawati, *op.cit*, hlm. 348.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 345-349.

Prasangka nasionalisme, kesetiaan dan kewarganegaraan masyarakat Tionghoa juga dipertanyakan oleh masyarakat umum. Masyarakat Tionghoa memiliki kebiasaan menggunakan unsur budaya leluhurnya dalam praktik sosial di masyarakat sehingga mereka nampak asing. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat Tionghoa seperti hidup secara eksklusif.

3.2.2. Krisis Ekonomi 1997

Selama tiga dekade di bawah masa orde baru, perekonomian Indonesia terbilang sangat stabil. Indonesia berhasil masuk dalam kategori negara “*New Industrialized Economies*” dengan Produk Domestik Bruto riil di angka 8% dan tingkat inflasi US\$ 1.014 di tahun 1996.⁷⁹ Namun kondisi baik tersebut berubah menjadi krisis yang berdampak besar bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepannya.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 sampai 1998 terjadi karena tertekannya mata uang rupiah. Tingkat depresiasi rupiah di tahun 1998 mencapai 70% dengan puncak di bulan Juli menyentuh nilai tukar Rp. 14.700 per US\$. Melemahnya nilai rupiah di pasar berbarengan dengan menurunnya nilai mata uang negara Asia lainnya. Gejolak kurs rupiah menjalar ke sektor perbankan yang menimbulkan terganggunya pasar antar bank dan mitra bank. Indikator krisis ekonomi bisa dilihat pada tabel:

⁷⁹ Elly Karmeli & Siti Fatimah, “Krisis Ekonomi Indonesia,” *Journal of Indonesian Applied Economics* 2, no. 2 (2008): 164–173. Hlm.164.

Tabel 3.5
Indikator krisis ekonomi 1997⁸⁰

Indikator	Krisis ekonomi 1997
Depresiasi rupiah	100%
Inflasi	20%
NPL Perbankan	60%
Suku Bunga SBI	50%
Suku Bunga PAUB	200%
Giro Bank Terhadap GWM	Minus Rp. 2,6 T
Cadangan Devisa	US\$ 22,1 M

Sumber : Kompas, dalam Edy Suandi Hamid, *La Riba Jurnal Islam* vol. III no. 1 tahun 2009, hlm. 7.

Krisis ekonomi 1997 sangat berdampak pada situasi sosial politik Indonesia. Merosotnya nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap sulitnya negara menutup APBN, utang yang melonjak tinggi sampai tingkat investasi menurun.⁸¹ Harga-harga yang ikut melambung tinggi diperparah dengan banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Tabel 3. 6
Data Penduduk Miskin 1978-1998⁸²

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Garis Kemiskinan (rp/kapita/bulan)	
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa
1978	8.30	38.90	47.20	30.80	33.40	33.30	4,969	2,981
1980	9.50	32.80	42.30	29.00	28.40	28.60	6,831	4,449
1981	9.30	31.30	40.60	28.10	26.50	26.90	9,777	5,877
1984	9.30	25.70	35.00	23.10	21.20	21.60	13,731	7,746
1987	9.70	20.30	30.00	20.10	16.10	17.40	17,381	10,294
1990	9.40	17.80	27.20	16.80	14.30	15.10	20,614	13,295
1993	8.70	17.20	25.90	13.40	13.80	13.70	27,905	18,244

⁸⁰ Sumber Kompas, dalam Edy Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* III, no. 1 (2009): 1–11. hlm. 7.

⁸¹ Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1999. hlm. 17.

⁸² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan, 1970-2017," *bps.go.id*.

1996	7.20	15.30	22.50	9.70	12.30	11.30	38,246	27,413
1997	9.42	24.59	34.01	13.39	19.78	17.47	42,032	31,366
1998	17.60	31.90	49.50	21.92	25.72	24.20	96,959	72,780

Sumber: Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/20/1494/jumlah-penduduk-miskin-presentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

Berdasarkan tabel 3.6 terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di kota dan desa dari 1997 ke 1998. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun kebelakang di masa orde baru. Kondisi sosial yang ikut terimbas memancing aksi-aksi ketidak puasan dari masyarakat untuk menuntut kesejahteraan. Terhitung pada tahun 1998 terdapat 500 kali pemogokan, 1.300 kali unjuk rasa oleh LSM dan 2000 kali demonstrasi oleh mahasiswa.⁸³

Banyaknya tuntutan, desakan dari berbagai lapisan masyarakat di tengah situasi sosial-ekonomi yang kacau tidak membuat Soeharto mengurungkan niatnya untuk kembali naik di podium pemilihan presiden periode 1998-2003. Hal tersebut terlihat dari upaya pembentukan koalisi-koalisi hingga penyampaian resmi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi pendukung (ABRI, UD, PP, PDI, KP) pada tanggal 8 Maret 1998.⁸⁴ Pasca jumpa pers dan pelengkapan administrasi pemilihan, MPR langsung mengadakan sidang umum yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998. Di hari tersebut Soeharto terpilih kembali menjadi presiden untuk masa jabatan ke tujuh kalinya. Soeharto disandingkan dengan wakil presiden B. J. Habibie. Penetapan pucuk pimpinan Indonesia yang baru disambut oleh berbagai penolakan dan aksi demonstrasi.

⁸³ Hasil catatan perusahaan konsultan Crosby Corporate Advisory, dalam Karmeli & Fatimah, "Krisis Ekonomi Indonesia." hlm. 168.

⁸⁴ Media Indonesia, 9 Maret 1998, dalam Tony Firman & Fadrik Aziz Firdausi, "20 Tahun Reformasi: Yang Terjadi Sepanjang Maret 1998," *tirto.Id*.

3.2.3. Maraknya Demonstrasi Tahun 1998

Demonstrasi yang terjadi pada bulan Mei 1998 merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya pernah dilakukan. Terhitung banyak sekali demonstrasi yang terjadi, salahsatunya unjuk rasa yang diinisiasi oleh perempuan. Perempuan-perempuan Indonesia yang pada saat itu tergabung dalam Suara Ibu Peduli melakukan aksi unjuk rasa tanggal 23 Februari di bundaran Hotel Indonesia.⁸⁵ Demonstrasi tersebut memiliki kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang dinilai gagal dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Harga yang melambung tinggi seperti susu menjadi fokus utama demonstrasi, disamping desakan untuk pembenahan sistem pemerintah.⁸⁶ Bulan selanjutnya, gelombang demonstrasi semakin meningkat dengan inisiator utama datang dari gerakan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa di masa orde baru mengalami stagnansi karena pergerakannya dibatasi pasca ditetapkannya SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).⁸⁷ Kadaan ekonomi-sosial yang kacau pasca krisis ekonomi di tahun 1997 membawa dorongan semangat dari mahasiswa

⁸⁵ Gadis Arivia, *Politik Representasi Suara Ibu Peduli*, Yayasan Jurnal Perempuan, (Jakarta, 2018), hlm. 4.

⁸⁶ Kenaikan harga susu menurut penyampaian Gadis Arivia pada saat itu sampai menyentuh 400% dan menjadi barang yang lumayan sulit ditemukan. Suara Ibu Peduli melakukan penggalangan dana untuk membeli susu dari pabrik langsung, lalu mereka melakukan aksi penjualan susu murah disamping melakukan demonstrasi *Ibid.* hlm. 2.

⁸⁷ Berlakunya kebijakan tersebut membuat mahasiswa fokus pada kegiatan akademik saja, sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa mengancam pemerintah sangat dibatasi dan diawasi. Priambodo, "Studi Komparasi Model Aksi Demonstrasi dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1966-1998," *Risalah 2*, no. 6 (2016): 1-7. hlm. 1.

untuk melakukan perubahan. Hal tersebut langsung terlihat dari banyaknya demonstrasi dan aksi lainnya dari rentang Maret-Mei tahun 1998.⁸⁸

Banyaknya aksi demonstrasi membuat pasukan ABRI bersiaga. Bahkan di bulan Maret untuk pertama kalinya Jenderal Wiranto yang menjabat sebagai Panglima ABRI menawarkan dialog terhadap mahasiswa. Selain menawarkan usulan dialog yang bersifat damai, reaksi dari pasukan pengaman ternyata berubah menjadi represif. Menurut penuturan Jenderal Wiranto yang dikutip dalam surat kabar Media Indonesia, ABRI dan TNI wajib waspada dengan aksi demonstrasi mahasiswa, menurutnya terdapat kelompok yang tidak memecahkan permasalahan tapi tampil jadi permasalahan yang baru. Tidak jarang demonstrasi yang awalnya dilakukan damai berujung bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan.⁸⁹

Tindakan kekerasan antara mahasiswa dan pasukan keamanan semakin panas ketika terjadi tragedi penembakan mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang awalnya berjalan damai⁹⁰ berubah menjadi kerusuhan besar. Ditengah

⁸⁸ Mahasiswa juga melakukan aksi keriphatinan. Aksi tersebut yang dilakukan di Universitas Nasional Jakarta, Universitas Lampung, Universitas Sebelas Maret, sampai Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan aksi keprihatinan dilakukan untuk memprotes masalah kenaikan harga dan mendesak pembenahan total sistem ekonomi-politik nasional. Salahsatu demonstrasi dilakukan di Universitas Gajah Mada yang dihadiri oleh 30 ribu mahasiswa, demonstrasi tersebut memiliki tujuan untuk menuntut pembentukan pemerintah yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Unjuk rasa serupa terjadi di berbagai kota, seperti Surabaya dan Solo. *Republika*, 12 Maret 1998, dalam Firman & Firdausi, *loc.cit*.

⁸⁹ Awal bulan Mei demonstrasi yang dilakukan di Bandung, Medan dan Yogyakarta berakhir bentrok yang mengakibatkan korban luka-luka. S. Dian Andryanto, "23 Tahun Reformasi: Rangkaian Peristiwa Mei 1998 Berujung Soeharto Lengser," *nasional.tempo.co*.

⁹⁰ Demonstrasi diisi dengan kegiatan mimbar bebas berupa orasi dari dosen-mahasiswa dan *long march* dari kampus menuju Gedung MPR/DPR. Ditengah perjalanan, massa bertambah banyak karena masyarakat ikut bergabung. Massa terhenti di kantor Wali Kota Jakarta Barat karena dihadang oleh aparat keamanan dan bersepakat untuk sama-sama mundur. Siti Jubaedah, "Gerakan Mahasiswa (Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru)," *Criksetra : Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2019): 18–40. hlm. 37-40.

pelaksanaan hasil negosiasi antara mahasiswa dan aparat untuk sama-sama mundur, muncul beberapa oknum yang menghujat dan memancing amarah dua pihak. Hasilnya penyerangan yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa tidak bisa dihindarkan. Pasukan aparat mulai melemparkan gas air mata dan tembakan terhadap massa. Penangkapan dan penyerangan terhadap mahasiswa dilakukan dengan kekerasan seperti pemukulan dengan pipa, penginjakan dan penendangan. Penangkapan mahasiswa dilakukan sampai di area lingkungan Universitas dan sekitarnya. Tragedi tersebut memakan banyak korban luka-luka dan hingga korban kehilangan nyawa.

3.3. Kronologi Kekerasan Seksual Tragedi 98 di Jakarta

Terjadinya tragedi Trisakti 12 Mei 1998 telah menyulut amarah rakyat Indonesia. Keadaan rakyat yang sengsara selama krisis ekonomi, ditambah dengan penetapan Soeharto sebagai presiden ditengah banyaknya penolakan dan desakan pembersihan KKN, hingga tindakan aparat yang semakin brutal ternyata memberikan dampak lanjutan. Dampak dari tragedi 12 Mei langsung terlihat di hari selanjutnya dengan terjadi kerusuhan massal 13-15 Mei 1998.

Titik awal kerusuhan massal di mulai dari sekitar Universitas Trisakti, Jakarta Barat yang langsung meluas ke wilayah Jakarta lainnya. Pagi hari, tanggal 13 Mei 1998 awalnya kegiatan berduka dan aksi mimbar bebas yang dilaksanakan di Universitas Trisakti berjalan damai dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. Massa yang berada di luar kampus mulai terpancing oleh provokator⁹¹ dengan

⁹¹ Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Adi Andoyo yang sekaligus menjabat sebagai Tim Pencari Fakta menyebutkan bahwa provokator merupakan pihak yang anti reformasi, mereka ingin mencederai aksi moral dan intelektual mahasiswa. Suara Pembaharuan, "Kronologis Aksi Massa 13 Mei," *Suara Pembaharuan* (Jakarta, 1998).

aksi-aksi pembakaran kendaraan, pelemparan batu dan makian-makian. Pukul 10.00 WIB massa mulai *chaos* dan mulai terjadi aksi anarkis seperti perusakan fasilitas-fasilitas jalan, pencegatan dan perusakan kendaraan, perusakan pohon, pembakaran, pelemparan batu, bentrok dengan aparat sampai banyak sekali tembakan dan gas air mata yang ditujukan pada massa.

Kerusuhan yang berada di Jakarta menyebar ke daerah sekitar, seperti Tangerang, Depok, Ciputat, Bekasi, Ciledug, Lenteng Agung, dan Cikarang. Terjadinya kerusuhan dalam intensitas besar di wilayah Jakarta tidak hanya menasar pada pencurian dan perusakan tempat saja. Terdapat tindak penyerangan pada manusia yang menyebabkan korban meninggal, orang hilang, hingga trauma psikis.⁹² Salah satu penyerangan terjadi pada perempuan-perempuan yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual.

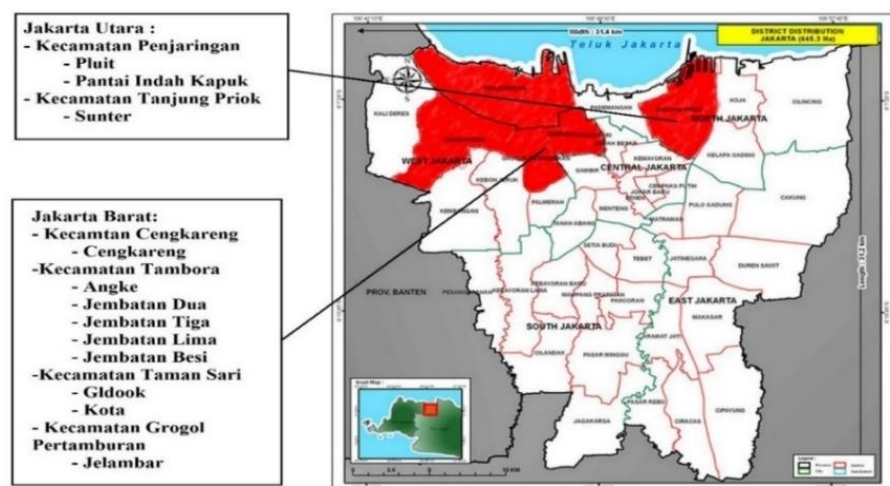
Terjadinya kekerasan seksual ditengah kerusuhan menjadi wujud penyerangan terhadap martabat manusia yang berhasil menimbulkan trauma besar bagi korban. Penyerangan tersebut lahir dari psikologis pelaku yang merasa ada peluang untuk melakukan tindakan biadab ditengah kondisi penjarahan yang menyeramkan bagi korban. Hal tersebut dijelaskan oleh Dr. Djamaludin Ancok, Psikolog dari Universitas Gajah Mada sebagai tindakan yang berasal dari hilangnya rasa berdosa dan bersalah karena individualisasi yang melebur dalam *crowd* yang besar.⁹³ Pelaku berani melakukan tindakan brutal karena mereka

⁹² Berdasarkan data dokumentasi tim relawan untuk kemanusiaan, jumlah korban meninggal akibat senjata/ lain berjumlah 27 orang, korban meninggal akibat pembakaran mencapai 1.190 orang, korban luka-luka mencapai 91 orang dan orang hilang berjumlah 31 orang. Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *op.cit.*, hlm. 47.

⁹³ Iwan Setiawan, "Kelak Targetnya Bukan Keturunan Cina, Tapi Semuanya," *Tempo Interaktif Analisa & Peristiwa Edisi 16/III* (Jakarta, 1998), hlm. 417.

melakukannya secara berkelompok. Individu yang masuk ke dalam kelompok akan mengalami de-individuasi yang membuat individu tersebut kehilangan kontrol moralitas dan rasionalitasnya. Para pelaku tidak melihat adanya dosa atau rasa bersalah. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Sartono Mukadis, Psikolog sosial yang menyebutkan bahwa para pelaku mengalami *split personality* dari akumulasi kondisi yang selalu dikatakan baik padahal realitanya tidak seperti itu.⁹⁴ Pemikiran dan peluang tersebut membuat tindakan penjarahan, perusakan dan pembakaran dilanjutkan dengan memuaskan nafsu berupa tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terjadi secara bersamaan dengan aksi kerusuhan dan penjarahan. Berbeda dengan kerusuhan yang terjadi di hampir semua bagian Jakarta, kasus kekerasan seksual ada kecenderungan hanya menysar pada daerah tertentu saja. Peta lokasi kejadian kekerasan seksual bisa dilihat dalam gambar 3.1



Gambar 3. 1

Peta lokasi kekerasan seksual 13-15 Mei 1998 di Jakarta

Sumber: Olah data Komnas Perempuan yang dikutip dalam Jurnal Politik, vol. 2, no. 2, 2007

⁹⁴ Suara Pembaharuan, “‘Split Personality’ Penyebab Terjadinya Penjarahan Barang,” *Suara Pembaharuan* (Jakarta, 1998), hlm. 3.

Berdasarkan gambar tersebut, kekerasan seksual kebanyakan ditemukan di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pemilihan ke dua wilayah tersebut mengarah pada wilayah konsentrasi penduduk etnis Tionghoa yang menjadi mayoritas korban kekerasan seksual. Berkumpulnya masyarakat Tionghoa di dua daerah tersebut tidak terlepas dari keyakinan mereka terhadap hubungan diri dan lingkungan sekitar dalam ajaran Taoisme. Menurut Edy Prabawo Susanto, seorang pengamat kebudayaan Tiongho. Daerah yang baik dan menguntungkan menurut kepercayaan Tionghoa adalah yang memiliki unsur gunung di belakang dan air di depan.⁹⁵ Daerah yang dianggap baik di daerah Jakarta berada di daerah Barat dan Utara yang disebut dengan “kepala naga”. Naga dalam mitologi Cina memiliki posisi kepala di hilir muara, badan di tengah dan kaki di selatan. Berdasarkan posisi tersebut daerah yang menjadi kepala naga adalah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang dipercaya memberikan keuntungan dalam kegiatan bisnis. Hal itulah yang mendasari masyarakat Tionghoa beramai-ramai melakukan kegiatan bisnis. Awalnya dilakukan di Jakarta barat seperti di daerah Glodok, Pasar Baru, Senen sampai Jatinegara. Kegiatan perekonomian lalu berkembang ke Jakarta Utara hingga kini daerah tersebut dikenal dengan kawasan perumahan elit yang menarik banyak investor.⁹⁶

⁹⁵ CNN, “Riwayat Glodok Si ‘Kepala Naga’ Jakarta,” *CNN.Com*, last modified 2021, <https://www.cnn.com/gaya-hidup/202102050244507-269-602526/riwayat-glodok-si-kepala-naga-jakarta>.

⁹⁶ Pebriansyah Ariefana, “Asal Usul Kepala Naga Jakarta Utara, Kisah Kawasan Paling Hoki Di Indonesia,” *Suara Jakarta*, last modified 2021, <https://jakarta.suara.com/read/2021/06/20/081500/asal-usul-kepala-naga-jakarta-utara-kisah-kawasan-paling-hoki-di-indonesia?page=1>.

Tabel 3. 7
Perbandingan lokasi kerusuhan dan kekerasan seksual di Jakarta

Wilayah	Lokasi Kerusuhan	Lokasi Kekerasan Seksual
Jakarta Pusat	Tanah Abang, Kemayoran, Pasar Baru, Galur, Sumur Batu, Cempaka Putih, Salemba, Harmoni, Tanah Abang	-
Jakarta Selatan	Pasar Minggu, Kalibata, Cinere, Fatmawati, Mampang, Cipete, Bintaro	-
Jakarta Timur	Pasar Rebo, Kampung Melayu, Kramat Jati, Klender, Matraman, Jatinegara, Rawamangun, Penas, Kalimalang	-
Jakarta Barat	Kebayoran Lama, Palmerah, Grogol, Green Garden, Roxy, Cengkareng, Bojong Indah, Jembatan Lima, Jelambar, Gajah Mada, Jembatan Dua, Glodok	Angke, Jelambar, Jembatan Dua, Jembatan Tiga, Jembatan Lima, Jembatan Besi, Cengkareng, Glodok, Kota
Jakarta Utara	Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Mangga Dua	Pluti, Sunter, Pantai Indah Kapuk

Sumber : Dokumentasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan

Terjadinya tindakan kekerasan seksual yang mengarah pada Kawasan konsentrasi penduduk Tionghoa dapat dilihat dalam tabel 3.7 di atas. Sebagian besar kasus paling banyak ditemukan di Jakarta Barat daerah Angke, Jelambar, Jembatan Dua, Jembatan Tiga, Jembatan Lima, Jembatan Besi, Cengkareng, Glodok, Kota. Jakarta Barat merupakan pemukiman warga Tionghoa dari kalangan menengah ke bawah dengan ciri khas Rumah Toko (Ruko) dan gedung kerja yang menjadi sasaran amukan massa. Kasus penjarahan dan kekerasan seksual di daerah Jakarta Barat bisa dengan mudah terjadi karena pengamanan dan akses keluar masuk daerah yang bebas. Berbeda dengan daerah kawasan perumahan elit di Jakarta Utara seperti Pluit, Sunter, dan Pantai Indah Kapuk yang biasanya memiliki pihak keamanan. Namun ditemukan juga kasus di Jakarta

Utara karena keadaan sedang *chaos*. Pemilihan korban bukan merupakan tindakan acak, perempuan etnis Tionghoa menjadi target yang cocok karena berada di posisi yang lemah secara gender dan politik sehingga sulit melakukan pembelaan dan perlindungan diri. Mereka mengalami *triple minority*, yaitu sebagai perempuan, Tionghoa dan Kristen.⁹⁷ Tindakan pengorbanan pada perempuan Tionghoa bisa di analisis dalam kontruksi pengetahuan yang dibangun oleh teori relasi kuasa menurut Foucault.

Foucault menjelaskan bahwa kuasa menciptakan pengetahuan. Pengetahuan yang diciptakan tersebut tidak lagi berbicara yang benar atau salah, tapi lebih ke hal praktis. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah orde baru terwujudkan dalam sebuah kebijakan, norma, dan aturan. Kebijakan dan norma yang berlaku bisa digunakan untuk menormalisasi pengetahuan yang dirangkai oleh pihak tertentu guna merebut kekuasaan atau mempertahankan dominasi. Adanya indikasi kesengajaan dalam memilih korban kekerasan seksual bisa dilihat dari kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah orde baru dalam menempatkan perempuan dan Tionghoa.

Pengetahuan yang dibuat oleh pemerintahan orde baru mengenai perempuan dan Tionghoa sangat diskriminatif. Perempuan ditempatkan sebagai pendukung lelaki yang tidak bisa dilepaskan dari tugasnya sebagai ibu dan istri. Pelekatan citra tersebut menciptakan relasi kuasa antara perempuan dan lelaki tidak seimbang. Perempuan menjadi kepemilikan atau properti dari lelaki, keluarga dan komunitasnya. Di sisi lain, pemerintah orde baru melekatkan Tionghoa dengan

⁹⁷ Iwan Setiawan, "Para Pemerkosa Itu Dikomando," *Tempo Interaktif Analisa & Peristiwa Edisi 16/III* (Jakarta, 1998), hlm. 413.

citra komunis yang dipertanyakan rasa nasionalismenya.⁹⁸ Hal tersebut terwujudkan dalam kebijakan⁹⁹ yang sangat anti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut membawa etnis Tionghoa menjadi takut untuk menunjukkan identitas sebenarnya karena dinilai asing.

Kontruksi pengetahuan yang dibuat dalam bentuk kebijakan, norma, dan program terhadap perempuan dan Tionghoa berhasil menciptakan pandangan dan isu sentimen terhadap mereka. Sikap benci tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk merugikan atau menyingkirkan pihak lain, dalam hal ini kelompok Tionghoa.¹⁰⁰ Perempuan-perempuan Tionghoa dianggap sebagai kepemilikan komunitasnya berada dalam posisi lemah sehingga tindakan kekerasan seksual dilakukan sebagai upaya menghancurkan komunitas tersebut.

Kekerasan seksual dalam tragedi 98 diawali dengan upaya kerusuhan dan penjarahan terlebih dahulu. Provokator akan melakukan pengumpulan massa di daerah tertentu dengan penyebaran sentimen anti Tionghoa lewat yel-yel atau hinaan. Mereka melakukan penghasutan kepada massa untuk membenci Tionghoa dan mengajak “perusakan” dan “penjarahan” pada tubuh perempuan Tionghoa. Tidak hanya melakukan penyebaran isu anti Tionghoa dan isu pemerkosaan secara langsung, ditemukan juga penggunaan telpon, informasi mulut ke mulut

⁹⁸ Kesenjangan sosial sudah sejak lama dibentuk untuk menghadirkan anggapan masyarakat bahwa WNI Tionghoa banyak yang berdagang sehingga mereka hanya memikirkan uang tanpa mau bergaul dengan orang Indonesia lainnya. Pemerintah membuat tempat tinggal eksklusif untuk WNI Tionghoa sehingga apabila ada konflik mereka yang disalahkan karena menciptakan kesenjangan. Suara Pembaharuan, “Perkosaan Brutal Untuk Kepentingan Politik,” Suara Pembaharuan (Jakarta, 1998).

⁹⁹ Pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), surat keterangan tidak terlibat dalam G30S/PKI, kebijakan pergantian nama, pelarangan bahasa Mandari dan budaya Tionghoa

¹⁰⁰ Anggraeni & Purwaningsih, *op.cit.*, hlm. 9.

lewat sopir-sopir, pedagang dan perorangan. Metode tersebut membuat penyebaran isu semakin meluas dengan cepat dan pengarahannya lebih besar.

Setelah massa terkumpul dan terprovokasi beberapa orang akan langsung memberi intruksi untuk melakukan penjarahan barang dan perusakan tempat. Biasanya provokator bukan berasal dari daerah terjadinya kerusuhan, mereka melakukan pembukaan paksa pada tempat-tempat penjarahan dan selanjutnya warga setempat diajak untuk mencuri barang di dalam tempat tersebut. Target tempat kerusuhan biasanya di pemukiman, tempat perbelanjaan, gedung, kantor, ruko dan fasilitas umum lainnya. Ditengah penjarahan ditemukan beberapa tempat yang sudah tutup dan diberi tulisan “milik pribumi atau milik muslim”. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa mereka tahu akan ada penyerangan pada kelompok tertentu.¹⁰¹ Massa yang semakin brutal dengan melakukan penjarahan di dalam berbagai tempat langsung dibakar oleh provokator. Tahap ini yang membuat korban jiwa tidak hanya berasal dari etnis Tionghoa saja namun banyak juga korban dari massa yang sedang melakukan penjarahan seperti masyarakat setempat, orang tua, dan anak-anak. Beberapa provokator ada juga yang melakukan penjarahan dengan tindakan kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan seksual yang ditemukan menurut penelusuran Tim Relawan untuk Kemanusiaan berupa pemerkosaan, penyerangan seksual, pelecehan seksual, ancaman dan penganiayaan. Menurut data yang dihimpun dari pernyataan saksi, korban, keluarga dan sahabat korban, kejadian kekerasan seksual kebanyakan dilakukan secara berkelompok (*gang rape*) yang dilakukan di

¹⁰¹ Anggraeni, *loc.cit.*

dalam rumah atau gedung dan dipertontonkan pada anggota keluarga korban. Tidak hanya dilakukan di dalam gedung, terdapat juga kekerasan seksual yang terjadi di tempat-tempat umum seperti dalam kendaraan pribadi, bus, jalan raya dan jembatan.

Ketika kekerasan seksual tersebut dilakukan, pelaku melakukan ancaman dan pemerasan terhadap korban. Setelah dilecehkan, dianiaya, dan diperkosa bergilir tidak jarang ada korban yang dibunuh dengan cara dibakar atau menggunakan benda tajam. Hal tersebut dialami oleh tiga kakak beradik yang memilukan. Sekelompok massa yang awalnya memasuki rumah dan melakukan penjarahan berubah menjadi tindak pemerkosaan pada dua di antara tiga kakak beradik tersebut. Setelah melakukan pemerkosaan, dua diantara korban dilempar ke lantai bawah yang sudah dibakar, satu lagi berhasil selamat karena ditolong oleh warga.¹⁰² Kasus lain menunjukkan bahwa korban pemerkosaan dicekik, ditusuk, dan ada beberapa korban yang trauma lalu memilih bunuh diri.¹⁰³

Data kasus didukung pernyataan dari kesaksian dokter yang menyebutkan bahwa kebanyakan korban datang ke Rumah Sakit sudah dalam kondisi goncangan psikis yang hebat, kasus mutilasi alat kelamin, penganiayaan dan penelanjangan sudah dipastikan terjadi sehingga dokter sulit untuk melakukan verifikasi pemerkosaan pada korban secara langsung.¹⁰⁴ Data tersebut masuk dalam kasus pemerkosaan. Pemerkosaan tidak hanya berupa tindakan penetrasi

¹⁰² Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁰³ Puji Sumedi H and Rustan F. Mandayun, "Ini Murni Dari Hati Nurani," *D&R Bayang-Bayang Ketakutan Itu No. 46/XXIX* (Jakarta, 1998), hlm. 50.

¹⁰⁴ Kartono Mohamad, "Pemukosaan Masal," *Tempo Pemerkosaan: Certa & Fakta Edisi 6-12 Oktober 1998* (Jakarta, 1998), hlm. 54.

alat kelamin pria ke wanita, bisa juga dilakukan dengan benda lain dan jari.¹⁰⁵ Pemerkosaan dikategorikan dalam kekerasan seksual karena terjadi dalam lingkungan yang penuh paksaan melalui ancaman, tekanan psikologis atau melalui penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa hasil temuan juga memperlihatkan adanya tindak penyiksaan seksual.

Penyiksaan seksual adalah penyerangan organ seksual atau seksualitas seseorang secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit secara fisik dan psikis. Contoh kasus tersebut dialami oleh dua pemuda. Berdasarkan kesaksian Ita Fatia Nadia yang saat itu menjabat sebagai Direktur Kalyanamitra sekaligus Tim Pendampingan Relawan untuk Kemanusiaan, korban diculik dan diperkosa secara ramai di dalam sebuah mobil. Tidak sampai disitu saja, mereka juga mengalami penganiayaan dengan disiksa pada bagian dada lalu dilempar keluar mobil.

Terdapat juga kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan non Tionghoa. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang tanpa dikehendaki dengan tujuan merendahkan dan menghina korban secara verbal, tulisan, atau tindakan langsung.¹⁰⁶ Kasus pelecehan yang ditemukan berupa kasus penelanjangan dan penyentuhan di “area-area terlarang”. Menurut wawancara yang dilakukan dalam Radio Belanda tanggal 8 Juni 1998, ada kasus suatu bus yang penumpangnya dipilih. Penumpang Tionghoa disuruh turun dan berbaris dengan telanjang. Penumpang cantik akan diperkosa sedangkan yang menurut mereka “kurang” cantik akan dibiarkan jalan

¹⁰⁵ Komnas Perempuan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁰⁶ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021,” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2021): 107–123.

telanjang.¹⁰⁷ Penelanjangan di sisi jalan dan digerayangi beramai-ramai kerap kali terjadi, bahkan kasus tersebut sampai ada yang membuat korban mengalami luka-luka dan memar pada tubuh.

Kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi di sepanjang tanggal 13-15 Mei 1998. Beberapa warga Tionghoa yang selamat berusaha untuk meninggalkan Jakarta dengan pergi ke hotel, luar daerah, dan luar negeri.¹⁰⁸ Usaha tersebut bukan berarti bisa dilakukan dengan mudah, banyak sekali akses jalan raya yang terhambat karena rusak, dipenuhi bangkai kendaraan, terhalang fasilitas umum yang rusak atau karena dicegat oleh massa.¹⁰⁹ Terdapat juga kejadian penganiayaan, perampokan dan pemerkosaan yang dilakukan di jalan antar kota. Hal tersebut dipertontonkan di tempat umum dan dilihat oleh masyarakat lain. Saksi yang melihat kebanyakan hanya diam karena merasa tidak berdaya.

Dampak kejadian tersebut juga berpengaruh pada saksi mata. Sebagian besar saksi menjadi diliputi rasa cemas dan takut. Menurut kesaksian Kakak salah satu saksi yang melihat korban pemerkosaan, Adiknya mengalami ketakutan yang mendalam sampai-sampai bicaranya meracau dan bergetar. Hal tersebut menunjukkan bahwa batas antara “menyaksikan” dan “mengalami” menjadi kabur karena goncangan psikis yang tidak bisa diterima akal sehat. Ketika ada korban atau saksi dan pendamping yang berani bersuara, tidak sedikit mereka mendapatkan ancaman seperti telepon-telepon intimidasi, perusakan tempat kerja, ancaman terhadap keluarga sampai kasus pembunuhan. Kasus kematian

¹⁰⁷ Tim Tempo, “Mereka Ditelanjangi, Diperkosa Dan Dibunuh,” *Tempo Interaktif Analisa & Peristiwa Edisi 16/III* (Jakarta, 1998), hlm. 403.

¹⁰⁸ Anggraeni, *loc.cit.*, hlm. 23.

¹⁰⁹ Suara Pembaharuan, “Suasana Perbatasan DKI-Tangerang Mencekam,” *Suara Pembaharuan* (Jakarta, 1998), hlm. 16.

Martadinata Haryono atau yang sering dipanggil Ita Martadinata menjadi salahsatu ancaman nyata terhadap korban dan penyintas.

Ita Martadinata merupakan gadis berusia 18 tahun yang menjadi korban pemerkosaan tragedi 98. Berusaha bangkit dari keterpurukannya, Ita dan ibunya bergabung menjadi bagian Tim Relawan untuk Kemanusiaan untuk membantu sesama korban. Keberanian Ita perlu diberikan apresiasi ketika dia bersedia memberikan kesaksian pada pertemuan pembela HAM Internasional di Amerika Serikat. Nahas, pada tanggal 9 Oktober 1998 sebelum keberangkatannya, Ita Martadinata ditemukan tewas di kamar. Kasus pembunuhan Ita Martadinata dengan cepat disimpulkan oleh kepolisian sebagai kasus perampokan. Berbeda dengan Komnas HAM yang diwakilkan oleh Albert Hasibuan sebagai upaya penyangkalan kasus kekerasan seksual dan berkaitan dengan tokoh-tokoh berkuasa. *Human Rights Watch* juga mengimbau langsung kepada Indonesia untuk segera memberikan perlindungan konkrit pada relawan dan melakukan pengusutan secara transparan pada kasus tragedi 98.